




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## DINAS PERHUBUNGAN KAB. BOGOR 2022

 Jalan Raya Jakarta Km. 50 Cimandala  
Bogor 16710

 (0251) 8652818

 [dishub@bogorkab.go.id](mailto:dishub@bogorkab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang mempunyai peran sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya

Menyadari peranan transportasi jalan maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata agar mampu mewujudkan keseimbangan pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan penumpang umum, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang dalam rangka perencanaan, pengaturan dan pengendalian tingkat pelayanan angkutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”**, dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang keempat yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan”**.

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bogor, Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah, sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi dengan strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintergrasi Serta Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Dengan strategi tersebut diharapkan tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dan menjangkau seluruh wilayah sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor.



Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Sasaran Perubahan RPJMD yaitu dengan Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi, dengan strategi Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas. Adapun Sasaran Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dengan strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi Serta Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.

### B. Maksud dan Tujuan

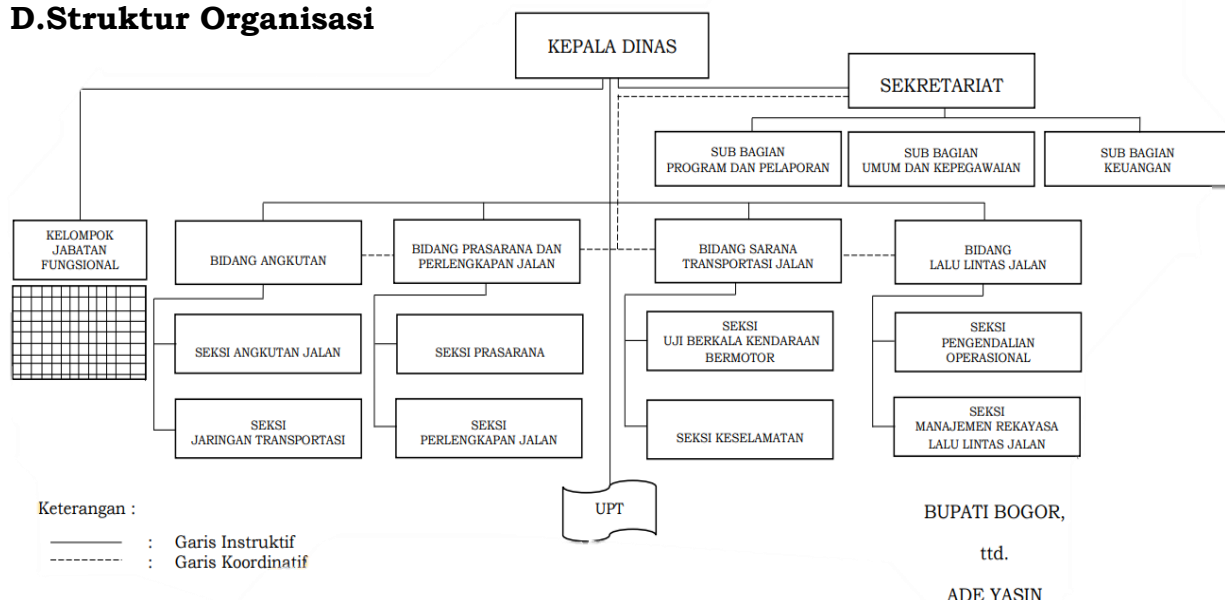
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- A. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- C. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan ; dan
- D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya

### D. Struktur Organisasi



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

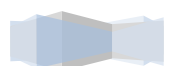
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018–2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2022.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar	Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	0,8	0,78			
Terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terjangkau	Presentase Layanan Angkutan darat	65%	65%			
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana			53 %	60 %	66 %

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana	60 %
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Presentase Aset dalam kondisi baik	B
	Temuan Materil	8 temuan
	Nilai AKIP	80%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

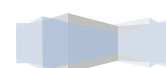
##### I. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Dinas Perhubungan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi” dengan Indikator “Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana” dan dijabarkan dibawah ini:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Target</b>	53	60
<b>Realisasi</b>	51	59.5
<b>Capaian Kinerja</b>	96.2	99.2

Peningkatan indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat dari tercapainya ketersediaan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sebesar 54% dan persentase pelayanan angkutan umum sebesar 65%.

Capaian indikator sasaran Dinas Perhubungan Kab. Bogor pada tahun 2022 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 99,2% meningkat 2,9% dari tahun sebelumnya.



## II. Perbandingan Capaian Kinerja

	2021	2022
<b>Target</b>	53	60
<b>Realisasi</b>	51	59.5
<b>Laporan Capaian</b>	96.2	99.2
<b>Peningkatan Realisasi dari tahun lalu</b>		8.5
<b>Peningkatan Capaian Kinerja dari tahun lalu</b>		2.9

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi pada Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sangat baik yaitu sebesar 59,5% meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya.

## III. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

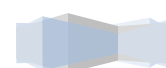
	2021	2022	2023
<b>Target</b>	53	60	66
<b>Realisasi</b>	51	59.5	
<b>Laporan Capaian</b>	96.2	99.2	
<b>Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra</b>		90.2	

Capaian kinerja tingkat ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2022 sudah mendekati pencapaian target akhir Renstra dengan capaian 90,2%. Realisasi tingkat ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2022 sebesar 59,5% dan target akhir Renstra sebesar 66%.

## IV. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2022 sebesar 59,5% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,2%. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target ada beberapa diantaranya :

1. Belum tersedianya (PERDA penyelenggaraan Perhubungan) dan Master Plan/Rencana Induk Transportasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2. Terbatasnya APBD kabupaten bogor untuk pemenuhan pengembangannya/pembangunan/pemeliharaan infrastruktur transportasi serta wilayah kabupaten bogor yang luas.
3. Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi khusus.



4. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dinas lain.
5. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online dan pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi.
6. Belum tersedianya data base secara lengkap serta lemahnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan dan pelanggaran perizinan data lalu lintas.
7. Struktur pagu anggaran Dinas Perhubungan yang tidak sesuai dengan pencapaian target dan sasaran dinas, dikarenakan 50% lebih anggaran digunakan untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum, sedangkan anggaran untuk pembangunan atau pengembangan infrastruktur transportasi sebagai target tujuan dan sasaran dinas kurang lebih 5% dari total anggaran.

Dinas Perhubungan Kab. Bogor telah membuat solusi-solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diantaranya :

1. Akan dilaksanakan penyusunan pada penyelenggaraan perhubungan dan penyusunan peraturan bupati tentang rencana induk transportasi kabupaten bogor sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada dinas perhubungan tahun 2023.
2. Pengembangan sistem pendanaan transportasi dengan melibatkan pihak swasta untuk pembangunan pengembangan infrastruktur transportasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM sesuai keperluan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan.
4. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadap target pemerintah daerah.
5. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan angkutan massal berbasis jalan/rel yang selamat, aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan.





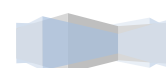
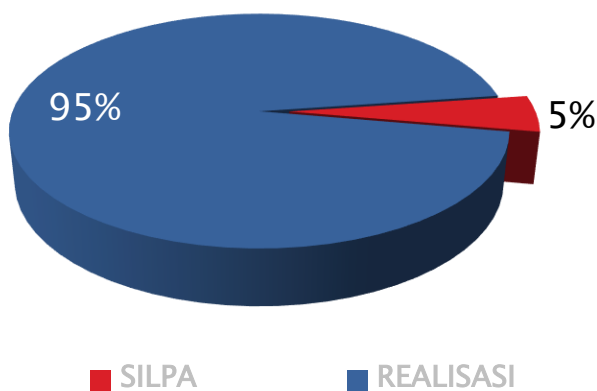
6. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi transportasi dan pengembangan fungsi perlengkapan jalan.
7. Mengkaji ulang tentang kewenangan pembayaran rekening listrik sehingga tidak membebani anggaran Dinas Perhubungan.

#### **V. Program-Program Terkait**

Program-program yang mendukung pencapaian indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi di wilayah Kabupaten Bogor meliputi 2 (dua) program antara lain Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

#### **VI. Informasi Efisiensi Pencapaian Indikator**

Program yang mendukung pencapaian indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Bogor meliputi 2 (dua) program yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan program Pengelolaan Perkeretaapian. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar Rp5.274.598.946 dari realisasi sebesar Rp107.411.599.897 setara 95,32%.

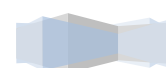


## B. Realisasi Anggaran

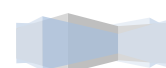
Uraian Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	Rp	Rp	%
<b>4</b>			
<b>I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41,474,666,337</b>	<b>40,042,077,462</b>	<b>96.5</b>
<b>1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>282,734,376</b>	<b>220,139,876</b>	<b>77.9</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	282,734,376	220,139,876	<b>77.9</b>
<b>2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,448,859,078</b>	<b>1,422,244,858</b>	<b>98.2</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	950,548,050	231,249,250	<b>24.3</b>
2 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	232,053,420	266,257,608	<b>114.7</b>
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266,257,608	924,738,000	<b>347.3</b>
<b>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,669,798,426</b>	<b>1,330,525,477</b>	<b>79.7</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,376,143	30,090,100	<b>95.9</b>
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	857,163,853	742,172,377	<b>86.6</b>
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,549,500	13,283,000	<b>71.6</b>
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129,967,430	104,664,000	<b>80.5</b>
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,972,500	36,573,000	<b>70.4</b>
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	178,170,000	176,595,000	<b>99.1</b>
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402,599,000	227,148,000	<b>56.4</b>
<b>4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>989,391,100</b>	<b>775,391,299</b>	<b>78.4</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			



1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,600,050	125,231,299	<b>83.2</b>
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	838,791,050	650,160,000	<b>77.5</b>
<b>5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>2,492,989,292</b>	<b>2,196,060,617</b>	<b>88.1</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850,178,550	608,674,475	<b>71.6</b>
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558,523,580	535,706,380	<b>95.9</b>
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181,283,150	168,709,500	<b>93.1</b>
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903,004,012	882,970,262	<b>97.8</b>
<b>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>1,793,367,275</b>	<b>1,688,578,031</b>	<b>94</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788,463,000	719,219,131	<b>91.2</b>
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115,640,480	94,129,400	<b>81.4</b>
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	704,690,360	702,469,000	<b>99.7</b>
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184,573,435	172,760,500	<b>93.6</b>
<b>7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>405,931,757</b>	<b>392,639,227</b>	<b>97</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144,730,292	142,894,996	<b>98.7</b>
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73,035,000	71,520,000	<b>97.9</b>
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,025,000	4,935,000	<b>98.2</b>
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,905,280	17,045,000	<b>95.2</b>
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,995,000	4,935,000	<b>98.8</b>



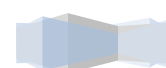
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,174,607	37,362,653	<b>88.6</b>
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118,066,578	113,946,578	<b>96.5</b>
<b>8</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>32,391,595,033</b>	<b>32,016,498,077</b>	<b>99</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32,111,841,790	31,743,680,617	<b>98.9</b>
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220,066,333	214,985,553	<b>97.7</b>
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9,666,270	9,596,269	<b>99.3</b>
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34,849,020	33,574,020	<b>96.3</b>
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,592,090	13,082,090	<b>96.2</b>
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,579,530	1,579,528	<b>100.0</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>70,918,280,236</b>	<b>67,099,182,984</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>52,348,503,439</b>	<b>49,722,750,229</b>	<b>95</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	43,669,906,111	41,412,588,069	<b>95</b>
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8,678,597,328	8,310,162,160	<b>96</b>
<b>2</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>474,001,871</b>	<b>451,951,421</b>	<b>95</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	474,001,871	451,951,421	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,764,615,748</b>	<b>1,617,198,195</b>	<b>92</b>



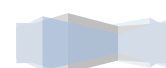
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	67,030,000	30,768,000	<b>46</b>
2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermoto	709,945,048	654,517,292	<b>92</b>
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	789,950,700	746,726,000	<b>95</b>
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	197,690,000	185,186,903	<b>94</b>
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>11,668,509,220</b>	<b>10,945,880,507</b>	<b>94</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10,813,026,319	10,205,972,488	<b>94</b>
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	728,149,851	718,708,019	<b>99</b>
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	127,333,050	21,200,000	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>3,576,429,479</b>	<b>3,415,333,648</b>	<b>95</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Pembangunan Gedung Terminal	3,396,681,861	3,285,211,950	<b>97</b>
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-	-	-
3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	179,747,618	130,121,698	<b>72</b>
<b>6</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>238,490,969</b>	<b>221,521,091</b>	<b>93</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			



1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	238,490,969	221,521,091	<b>93</b>
<b>7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>114,907,029</b>	<b>58,127,836</b>	<b>51</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32,036,743	25,366,568	<b>79</b>
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	82,870,286	32,761,268	<b>40</b>
<b>8 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>334,636,910</b>	<b>282,071,371</b>	<b>84</b>
1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	144,071,799	120,414,786	<b>84</b>
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	189,425,111	160,588,585	<b>85</b>
3	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1,140,000	1,068,000	<b>94</b>
<b>9 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>268,282,129</b>	<b>264,034,220</b>	<b>98</b>
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	268,282,129	264,034,220	<b>98</b>
<b>10 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>		<b>102,366,080</b>	<b>95,027,928</b>	<b>93</b>



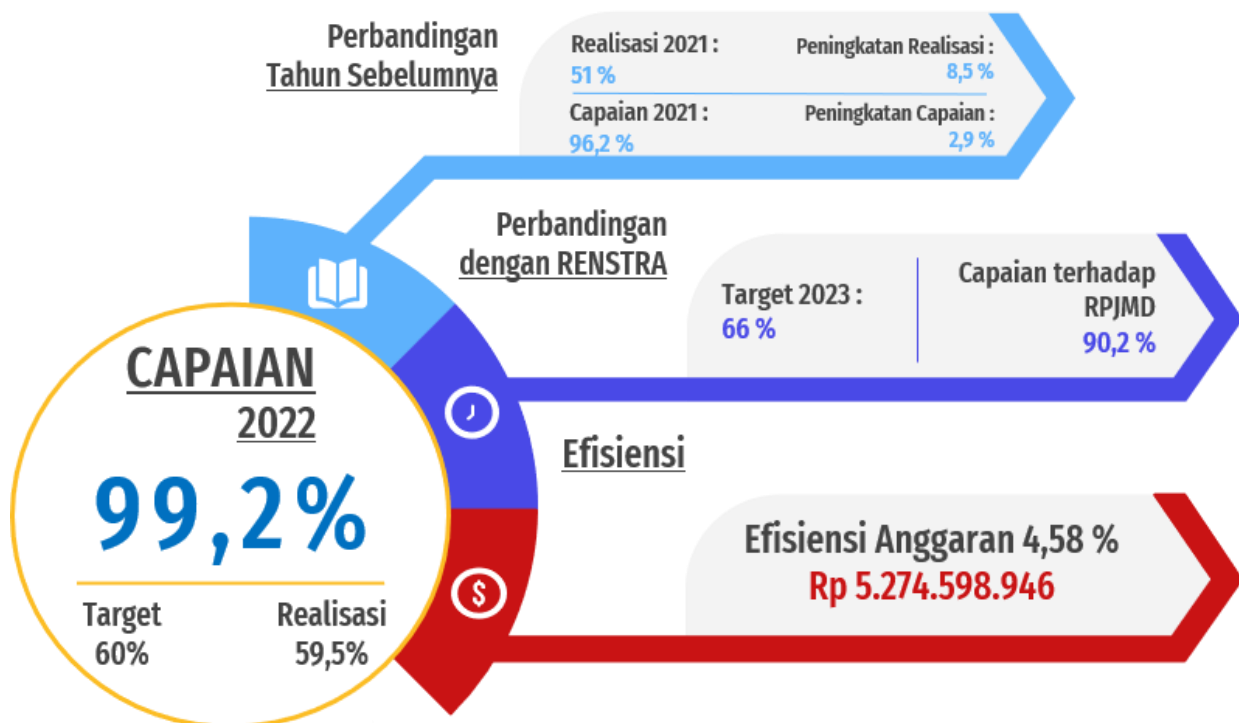
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102,366,080	95,027,928	<b>93</b>
<b>11</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27,537,362</b>	<b>25,286,538</b>	<b>92</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	27,537,362	25,286,538	<b>92</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAAN</b>	<b>293,252,270</b>	<b>270,339,451</b>	<b>92</b>
<b>1</b>	<b>Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>293,252,270</b>	<b>270,339,451</b>	<b>92</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	293,252,270	270,339,451	<b>92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>112,686,198,843</b>	<b>107,411,599,897</b>	<b>95.32</b>



## BAB IV

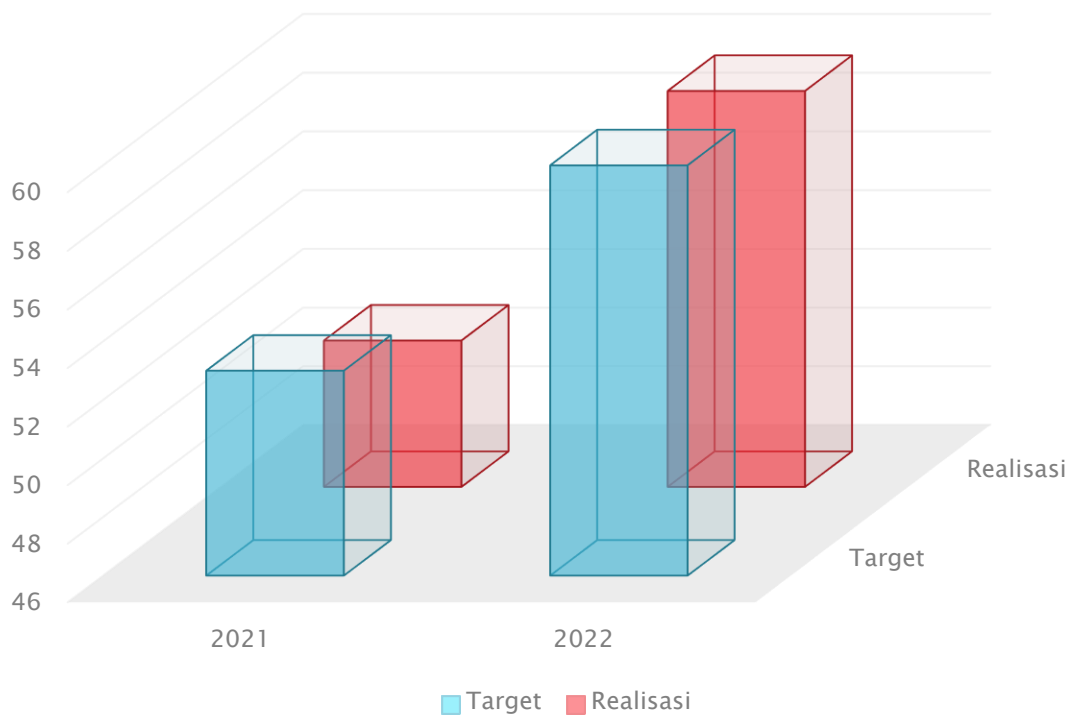
### PENUTUP

Secara keseluruhan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2022 yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana telah dicapai, dengan realisasi capaian 59,5% dari target capaian sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 99,2% meningkat sebesar 2,9% dari tahun lalu. Program-program yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang mendukung pencapaian kinerja meliputi 2 (dua) program antara lain Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian, dengan tingkat realisasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 96,55% Atau setara Rp 72.373.781.930 Untuk efisiensi Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar 92,19% atau setara Rp 270.339.451





## Grafik Capaian Kinerja

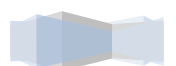


Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perhubungan. Namun demikian, untuk tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Sukaraja, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR**

**A. AGUS RIDALLAH, SH, MH**  
**NIP. 196908012001121003**



## **LAMPIRAN**

1 JANKIN

2. RENSTRA PERB

3 RENJA 22

Data angkutan sama fpj sampe tahun 2022